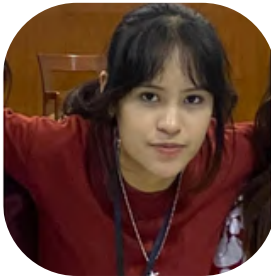




Opini



Berpolitik dengan Nalar, Bukan Iman

oleh **Mika Tiur Elisabeth Lubis**
Mahasiswa UTarki - S1 Ilmu Komunikasi

Indonesia sering digambarkan sebagai negara yang menjunjung tinggi keramahan dan toleransi. Namun, dalam praktik sosial dan politik, isu agama hampir selalu menjadi elemen sentral yang dibawa oleh individu. Ranah politik, idealnya berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang. Akan tetapi, kerap kali dimanfaatkan sebagai platform untuk "promosi" agama.



Sumber: <https://www.kompasiana.com/hamkahuseinhs/5ba638bfc112fe301479c1b8/agama-politik-dan-kekuasaa>

Fenomena ini mencerminkan adanya perbedaan mendasar dalam perspektif masyarakat Indonesia dan masyarakat di beberapa negara lain, salah satunya adalah Amerika Serikat, dalam memandang peran pemimpin dan agama. Contohnya, ketika muncul kabar mengenai Zohran Mamdani, seorang anggota Dewan Kota New York pertama yang beragama Islam, sejumlah komentar dari warganet Indonesia melalui media sosial menunjukkan fokus yang kuat terhadap agama dari Zohran Mandani. Komentar-komentar tersebut menunjukkan kekecewaan atas dukungan Zohran Mandani terhadap komunitas LGBT, dengan harapan bahwa ia seharusnya membawa masyarakat New York ke arah yang dianggap lebih "benar," yang secara implisit merujuk pada nilai-nilai keislaman.



Sumber: https://www.pinterest.com/pin/43065740181795293/sent/?invite_code=7008cef77d42452e96702f00e05cc6c9&sender=973622150600609003&sfo=1

Kontrasnya, kemenangan Mamdani mengindikasikan bahwa konstituennya di New York cenderung memprioritaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesempatan untuk hidup damai dan bebas pada semua warga New York dari berbagai latar belakang. Warga New York memilih Zohran Mamdani tanpa fokus pada latar belakang agamanya, melainkan berdasarkan visi dan misinya yang berfokus pada kaum minoritas dan komitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi semua warga New York tanpa adanya diskriminasi.

Di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat masih berfokus pada identitas keagamaan seorang pemimpin, bahkan terkadang mengabaikan rekam jejak dan prestasi yang dimilikinya.

Apabila ada seorang pemimpin yang kompeten yang tidak berasal dari agama mayoritas, ia akan rentan untuk dijatuhkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa agama masih menjadi penentu utama dalam memilih pemimpin di Indonesia. Padahal, politik itu seharusnya lepas dari sentimen agama dan didasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas dan kepentingan umum.

Ideologi Pancasila, meskipun mencantumkan nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa," hakikatnya didasarkan pada kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk dengan enam agama resmi. Artinya, masyarakat sosial di Indonesia adalah masyarakat yang pluralisme. Prinsip ini seharusnya menjadi landasan bahwa sistem politik dan hukum di Indonesia tidak boleh bias atau didominasi oleh suatu agama tertentu. Bahkan, seharusnya tidak ada sangkut paut dengan agama mana pun, melainkan bersangkut paut kepada kebutuhan masyarakatnya saja sebagai pemegang agama. Misalnya, hukum di Indonesia tidak boleh didasarkan pada ajaran atau peraturan salah satu agama, melainkan fokus kepada akses pembangunan rumah ibadah kepada semua kelompok agama. Prioritas masyarakat dalam berpolitik seharusnya bergeser dari identitas agama ke integritas, kompetensi, dan komitmen pemimpin terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat.



Sumber: <https://geotimes.id/kolom/agama-dan-politik-2/>

Apabila negara ini terus didominasi oleh sentimen agama dan mengesampingkan kebutuhan serta keadilan bagi seluruh rakyat, terutama kaum minoritas, maka kemajuan negara Indonesia akan terhambat. Kemudian, adanya penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik juga akan merusak persatuan dan menghambat terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, sangat penting bagi kita untuk mulai mengedepankan pemikiran yang rasional dan terbuka. Kita harus memahami bahwa ideologi Indonesia didasarkan pada kebutuhan sosial untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan, bukan didasarkan pada dogma salah satu agama. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kita harus fokus pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pada bias atau kemauan mayoritas.